

ANALISIS RKP DAN PEMBICARAAN PENDAHULUAN APBN

No. 01/an.PKA/PP/VI/2020

**OUTLOOK PEREKONOMIAN INDONESIA TAHUN 2021:
“OPTIMISME PENGUATAN FUNDAMENTAL EKONOMI
DI TENGAH KETIDAKPASTIAN”**

**PUSAT KAJIAN ANGGARAN
BADAN KEAHLIAN – SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

OUTLOOK PEREKONOMIAN INDONESIA TAHUN 2021

“Optimisme Penguatan Fundamental Ekonomi di Tengah Ketidakpastian”

OLEH DWI RESTI PRATIWI

HIGHLIGHT

- Tren persebaran Covid-19 di beberapa negara mulai mengindikasikan ke arah penurunan, sehingga hal ini menumbuhkan optimisme pemulihan ekonomi akan dimulai tahun 2021 meskipun berakhirnya pandemi ini sulit dipastikan. Tentunya pemulihan ini didukung dengan berbagai stimulus ekonomi melalui kebijakan fiskal maupun moneter. Pemulihan ini diharapkan juga akan terjadi di Indonesia seiring dengan membaiknya perekonomian global.
- Struktur pertumbuhan ekonomi yang berorientasi pada permintaan domestik menjadikan Indonesia menjadi salah satu negara yang lebih rendah terkena ancaman resesi global. Dengan demikian, pemulihan pertumbuhan untuk kembali pada level pra-Covid akan lebih cepat. Melihat tren pertumbuhan periode 2015-2019 yang berada pada keseimbangan baru yaitu 5,03 persen, maka pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan dapat kembali pada kisaran 4,9-5,1 persen di tahun 2021.
- Tren inflasi sepanjang tahun 2018-2019 berada di kisaran angka yang rendah yaitu 2,9 persen. Di kuartal I 2020, inflasi tetap bertahan di kisaran yang rendah, maka diperkirakan tren ini akan terus berlanjut hingga 2021. Diperkirakan inflasi tahun 2021 dapat kembali terjaga di kisaran rendah dan stabil. Meskipun demikian, inflasi yang terus rendah perlu diwaspadai adanya penurunan permintaan, sehingga kebijakan perlu merespon perkembangan tersebut.
- Kinerja perdagangan yang surplus pada kuartal 1 di tengah wabah pandemi Covid-19 membawa optimisme ketahanan eksternal yang baik di tahun 2021. Atas kondisi tersebut neraca berjalan terhadap PDB pada tahun 2021 dapat dijaga di kisaran rendah.
- Nilai tukar rupiah fluktuatif di masa pandemi dan bergerak menguat hingga Mei 2020. Diperkirakan di tahun 2021 kembali menguat, didukung faktor fundamental yang terjaga, terutama dikarenakan inflasi terjaga rendah dan membaiknya neraca perdagangan.
- Kebijakan moneter yang akomodatif perlu berlanjut di tahun 2021 sebagai langkah awal dalam meningkatkan kembali gairah perekonomian. Melalui kebijakan moneter ini diharapkan pertumbuhan ekonomi yang baik, stabilitas harga yang terjaga serta keseimbangan neraca pembayaran yang positif dapat tercapai di tahun 2021.
- Kebijakan fiskal 2021 yang disusun harus memperkuat daya tahan ekonomi nasional yang mampu mengatasi berbagai risiko yang muncul sekaligus melindungi ekonomi negara dari gejolak dan ketidakpastian ekonomi global, termasuk akibat bencana non alam seperti merebaknya virus corona.
- Tahun 2021 harus menjadi momentum dalam melaksanakan pemulihan sosial ekonomi dan meningkatkan fundamental ekonomi melalui reformasi kebijakan fiskal maupun moneter.



Pandemi Covid-19 : Menghantam Perekonomian Global Tahun 2020 dan Diekspektasikan Bangkit Di Tahun 2021 dengan Dukungan Kebijakan Moneter dan Fiskal

Optimisme peningkatan ekonomi global di tahun 2020 berubah setelah mewabahnya *corona virus disease- 19* (Covid-19) sejak awal tahun ini. Dalam kurun waktu 5 bulan, secara global penderita Covid-19 sudah mencapai lebih dari 5.400.000 jiwa dengan total meninggal melebihi 340.000 jiwa. Episentrum persebaran Covid-19 yang awalnya di Tiongkok bergeser ke Amerika Serikat dan Eropa. Adapun 10 negara yang saat ini mengalami kasus terbesar yaitu Amerika Serikat, Brazil, Rusia, Spanyol, Inggris, Italia, Prancis, Jerman, Turki, dan Iran. Amerika Serikat kini mengalami kondisi terparah akibat Covid-19 ini dimana kasus yang positif sudah mencapai lebih dari 1.600.000 jiwa atau 30 persen kasus Covid-19 secara global. Sementara itu, Tiongkok kini mulai memulih dan posisinya turun ke posisi 14. [Worldmeter, Data Per 24 Mei 2020]

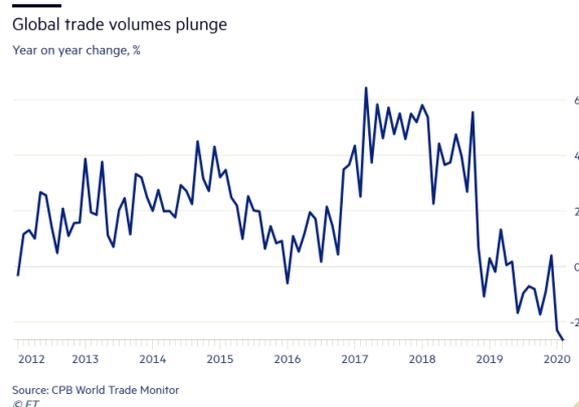
Hingga memasuki kuartal II Tahun 2020, kondisi global semakin diselimuti ketidakpastian. IMF menyatakan bahwa saat ini dunia mengalami krisis yang tidak biasa, belum pernah dalam sejarah IMF menyaksikan perekonomian global mengalami stagnansi seperti ini (WEF, 2020). Stagnansi tersebut tercermin pada *Global Purchasing Managers Index* (PMI) yang tercatat sangat rendah di bulan April 2020 ini dibawah 40 (Gambar 1). Hal ini menunjukkan pesimisnya pelaku bisnis terhadap prospek ekonomi, yang menandakan berbagai sektor ekonomi mengalami kontraksi.

Gambar 1. *Purchasing Manager's Index* (PMI) Survey Tahun 2006-April 2020



Sumber : *Week Ahead Economic Preview 1 Mei 2020, HIS Markit*

Gambar 2. Volume Perdagangan Global (persen)



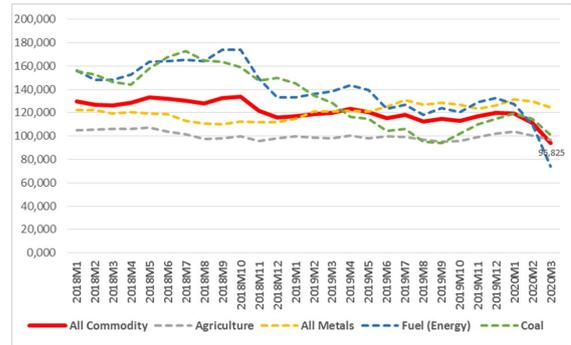
Sumber : *Financial Times, 2020*

Penurunan indeks PMI yang terjadi secara global di triwulan I 2020 tak terlepas dari terganggunya rantai pasokan global karena tertahannya aktivitas produksi di beberapa negara. Secara umum, pandemi covid-19 menekan kinerja perekonomian melalui 3 jalur yaitu perdagangan (ekspor-impor), investasi dan permintaan. Perdagangan global menurun pada laju yang cukup cepat akibat pandemi ini. Volume perdagangan global barang turun 2,6 persen (yoy) pada Februari 2020. Sementara itu, dibandingkan dengan bulan sebelumnya, perdagangan global turun 1,5 persen (mtm) (Gambar 2).

Akibat penurunan aktivitas perdagangan tersebut berdampak pada harga komoditas yang mengalami penurunan. Terlihat pada gambar 3, indeks harga komoditas global mengalami penurunan sejak awal tahun 2020. Penurunan tersebut terjadi di hampir semua komoditas termasuk pertanian, logam, minyak bumi dan batubara. Bahkan harga minyak dunia tercatat mengalami penurunan yang sangat tajam sejak awal tahun 2020 (Gambar 4). Kondisi ini ditenggarai akibat ketidaktercapainya kesepakatan antara OPEC dengan Rusia untuk memperdalam kebijakan pengurangan produksi yang bertujuan untuk menopang harga. Anjloknya harga minyak akan terancam terus berlanjut seiring belum dikendalikannya penyebaran Covid-19.

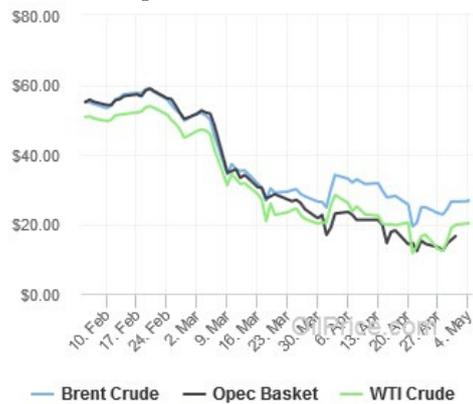
Pandemi Covid-19 turut meningkatkan ketidakpastian pasar keuangan dan pengembalian modal ke aset keuangan yang dianggap aman. Dimana penyebaran Covid-19 ini telah memicu terjadinya aliran modal keluar di seluruh negara, terutama dialami negara berkembang yang mengalami peningkatan resiko. IMF (2020) mencatat aliran portofolio ke pasar negara berkembang telah mengalami pembalikan yang sangat tajam. Aliran keluar portofolio non-residen dari pasar negara berkembang mencapai tingkat rekor tertinggi dalam dolar yaitu lebih dari USD100 miliar sejak 21 Januari (IMF 2020). Pada gambar 5, terlihat bahwa aliran investasi terhadap PDB di kuartal pertama tahun 2020 tercatat terendah dibandingkan beberapa krisis tkeuangan tahun 2008 dan *taper tantrum* 2013.

Gambar. 3 Indeks Harga Komoditas per Bulan Tahun 2018-2020



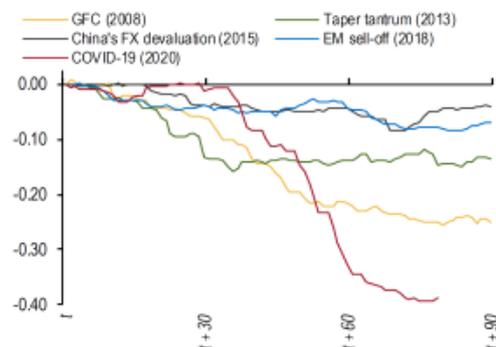
Sumber : IMF,2020

Gambar 4. Harga Minyak Brent, WTI dan OPEC Basket (USD per Barel)



Sumber : Oilprice.com (per 5 Mei 2020)

Gambar 5. Aliran Kumulatif Portofolio Non Residen pada Negara Berkembang (% Terhadap GDP, Berdasarkan observasi harian)



Sumber : IMF,2020

"Atas berbagai uraian tekanan terhadap ekonomi tersebut, pertumbuhan ekonomi 2020 akan mengalami kontraksi yang tajam. OECD memroyeksi pertumbuhan ekonomi global tahun 2020 sebesar 2,4 persen (Per Maret 2020 ini). Sementara itu IMF dalam *World Economic Outlook* (WEO) April 2020, memroyeksi pertumbuhan ekonomi global mengalami kontraksi yang dalam hingga negatif 3 persen. Lebih dalam lagi, Fitchrating meprediksi global mengalami perlambatan hingga negatif 3,9 persen (per April 2020)."

Dalam mengantisipasi kondisi yang semakin memburuk, beberapa negara telah bertindak cepat dengan mengeluarkan berbagai kebijakan ultra akomodatif yang diharapkan dapat mengurangi dampak ekonomi yang semakin parah. Diantaranya, The Federal Reserves (the Fed) dan Bank of Canada telah menurunkan suku bunga kebijakan hingga 150 bps sejak awal 2019, demikian pula sebagian besar negara maju dan berkembang juga menurunkan suku bunga kebijakan. Selain itu, pelonggaran moneter juga dilakukan sejumlah bank sentral melalui *Quantitative Easing* (QE) secara masif. The Fed melakukan QE melalui pembelian US *Treasury* (UST) dan *Mortgage Backed Securities* serta *Municipal Bonds* dan *bond* yang lebih berisiko hingga USD2,3 triliun atau sekitar 10 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) AS.

Tentunya kebijakan pelonggaran moneter tersebut harus didukung oleh berbagai kebijakan stimulus fiskal agar berdampak pada perekonomian khususnya sektor riil. Adapun stimulus fiskal yang telah dilaksanakan berbagai negara diantaranya berupa penurunan

tarif pajak, pinjaman lunak untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), paket kesehatan, dan stimulus untuk pariwisata dan sektor terdampak. (CNBC 2020). Beberapa peneliti memperkirakan pandemi ini akan usai di semester II tahun 2020 dengan dukungan pembatasan mobilisasi di berbagai negara. Seiring berakhirnya pandemi ini, maka aktivitas ekonomi akan berjalan normal kembali. Dengan pemulihan tersebut serta didukung kebijakan fiskal dan moneter maka beberapa lembaga internasional memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global di tahun 2021 dapat melaju dengan baik.

Tabel 1. Prediksi Pertumbuhan Ekonomi Global (Persen)

Lembaga	2020	2021
IMF	-3	5,8
OECD	2,4	3,3
Moody's	0,5	3,2
Fitch	-3,9	5

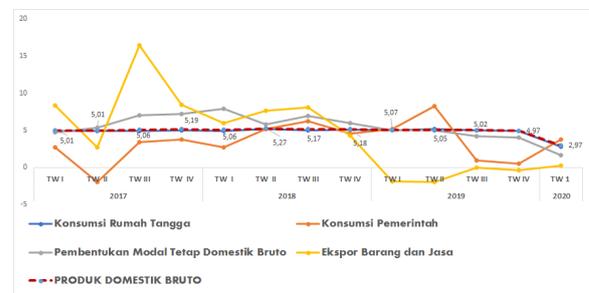
Sumber : IMF,OECD, Moody's, Fitchratings 2020

PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA

Diprediksi Cepat Mengalami Pemulihan Ditopang oleh Struktur Ekonomi yang Berorientasi Domestik, Namun Pemulihan ini Perlu Direspon oleh Kebijakan Penanganan Covid-19 yang Efektif

Rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2017-2019 berada diangka 5,08 persen. Hampir semua komponen pengeluaran PDB menunjukkan tren perlambatan sejak kuartal IV 2018 terutama untuk ekspor barang dan jasa. Kinerja ekspor tercatat mengalami kontraksi cukup dalam sejak memasuki kuartal I 2019 yaitu negatif 1,87 persen dan terus menunjukkan penurunan hingga kuartal IV 2019 (Gambar 6). Meskipun demikian, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih bergerak dikisaran 5 persen karena 58 persen PDB Indonesia ditopang oleh konsumsi rumah tangga.

Gambar 6. Pertumbuhan PDB Pengeluaran Per Triwulan Tahun 2017-2020 (persen)



Sumber : BPS, 2020

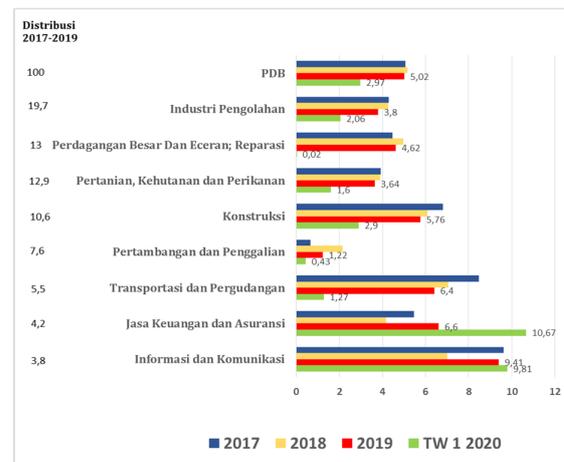
Pertumbuhan konsumsi rumah tangga masih bergerak dikisaran 5 persen meskipun sempat mengalami perlambatan di kuartal IV 2019 yaitu 4,97 persen (yoy). PMTB yang menyumbang 32 persen terhadap PDB juga menunjukkan tren perlambatan sejak triwulan akhir 2018. Memasuki kuartal I 2019, PMTB hanya mampu tumbuh 5,03 persen dimana angka ini jauh lebih kecil pada periode yang sama tahun 2018 yang mencapai 7,94 persen. Kondisi ini terus terjadi hingga kuartal IV 2019 dimana PMTB turun drastis hingga 4,06 persen (yoy).

Memasuki tahun 2020, pertumbuhan ekonomi semakin terpukul akibat terganggunya aktivitas ekonomi oleh merebaknya Covid-19. Pada gambar 7 menunjukkan pertumbuhan ekonomi kuartal I tahun 2020 hanya mampu dicapai 2,97 persen. Angka ini jauh rendah dari prediksi Pemerintah dan BI yaitu dikisaran 4,5 persen. Namun ternyata dampak Covid-19 sudah langsung dirasakan di kuartal I meskipun kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) belum dilaksanakan di beberapa provinsi. Hal ini menandakan Indonesia akan menghadapi tekanan perekonomian yang cukup berat mengingat di kuartal II pertumbuhan ekonomi akan jauh lebih rendah karena semakin meluasnya Covid-19 dan PSBB sudah diberlakukan.

Adapun komponen yang paling terdampak ialah konsumsi rumah tangga yang hanya mampu tumbuh 2,84 persen serta PMTB yang hanya tumbuh 1,7 persen (yoy). Sementara itu kinerja ekspor impor masih rendah di angka 0,24 persen (yoy) namun lebih baik di banding tahun 2019 yang sempat menunjukkan pertumbuhan negatif. Pengeluaran pemerintah justru menjadi penopang pertumbuhan dengan tumbuh 3,74 persen (yoy).

Bila dilihat dari lapangan usaha, hampir semua sektor di tahun 2019 mengalami perlambatan terutama pada sektor yang terkait dengan ekspor dan impor serta investasi (gambar 7).

Gambar 7. Pertumbuhan PDB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017-2019 (Persen)



Sumber : BPS, 2020

Industri pengolahan yang menopang kinerja PDB sebesar 19 persen tumbuh melambat di tahun 2019 yaitu hanya 3,8 persen seiring dengan prospek ekspor yang menurun dan melambatnya investasi. Begitu juga dua sektor terbesar lainnya yaitu sektor perdagangan dan pertanian yang menunjukkan tren melambat di tahun 2019. Sementara itu, sektor yang mengalami laju pertumbuhan yang tinggi yaitu sektor jasa keuangan dan informasi dan komunikasi. Untuk sektor industri, dapat dipastikan sektor ini akan mengalami guncangan yang lebih dalam akibat pandemi Covid-19 yang terjadi sejak awal 2020. Begitu juga dengan sektor konstruksi yang melambat seiring dengan melemahnya investasi.

Di tahun 2020 ini dipastikan sebagian besar sektor ekonomi mengalami perlambatan. Hal ini tak terlepas dari menurunnya permintaan dan pembatasan mobilisasi masyarakat dalam meminimalisasi penyebaran Covid-19. Terlihat bahwa pada kuartal I 2020 hampir semua sektor ekonomi terutama penyumbang PDB terbesar mengalami perlambatan yang cukup drastis. Pertumbuhan sektor industri pengolahan pada kuartal I 2020 ini hanya 2,06 persen, perdagangan besar dan eceran turun hingga 0,02 persen serta pertanian hanya tumbuh 1,6 persen.

Sementara itu sektor ekonomi yang melaju cukup tinggi di tengah pandemi ini yaitu setor jasa keuangan serta informasi dan komunikasi.

Morgan Stanley (2020) meramalkan Indonesia bisa cepat keluar dari krisis karena perekonomian Indonesia lebih berorientasi domestik dan minimnya eksposur terhadap rantai pasok global. Adapun Morgan Stanley mengelompokkan Indonesia, India, dan Filipina pada kelompok negara kedua atau terkena dampak resesi yang lebih rendah berkat pertumbuhan struktural yang tinggi, dimana Tiongkok masuk kelompok pertama. Deretan negara ini dinilai dapat kembali ke level pra-Covid-19 setelah Tiongkok. Namun, menurut asumsi Morgan Stanley, kondisi ini dapat tercapai apabila pandemi ini tidak semakin parah pada akhir kuartal II 2020.

Adapun beberapa faktor yang perlu diperhatikan agar pemulihan ini tidak terhambat yaitu keefektifan pemerintah dalam merespon situasi pandemi dan peluang dalam mengambil pelonggaran kebijakan yang tepat.

Dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut serta melihat tren pertumbuhan pra Covid-19 dari tahun 2015-2019 dimana ekonomi Indonesia tumbuh pada keseimbangan baru yaitu 5,03 persen, maka diperkirakan di tahun 2021 Indonesia dapat kembali pulih pada keseimbangan tersebut dikisaran pertumbuhan 4,9-5,1 persen¹. Pemulihan ini didukung oleh struktur ekonomi Indonesia yang lebih berorientasi pada permintaan domestik. Kisaran tersebut akan dapat tercapai apabila persebaran wabah Covid-19 mulai menunjukkan penurunan di kuartal II dan mambaik di kuartal III. Adapun, OECD memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2021 dikisaran 5,1 persen. ADB memroyeksi ekonomi Indonesia mampu tumbuh 5 persen di tahun 2021. World Bank memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia dikisaran 5,2 persen. Bahkan IMF dalam Laporan *World Economic Outlook* April 2020 memproyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 8 persen.

INFLASI Diperkirakan Tetap Terjaga Rendah, Namun Perlu Diwaspadai Akan Adanya Penurunan Daya Beli

Sepanjang tahun 2018 hingga April 2020, inflasi tetap terjaga rendah dalam mendukung stabilitas perekonomian. Adapun rata-rata inflasi tahun 2018-2019 tercatat di level 2,9 persen. Memasuki tahun 2020 inflasi masih dikisaran rendah. Adapun hingga di bulan April inflasi tercatat 0,08 persen (mtm) atau 2,67 persen (yoy).

Rendahnya inflasi di masa pandemi ini mengindikasikan bahwa terjadi penurunan daya beli masyarakat yang berdampak pada rendahnya permintaan sehingga inflasi selalu berada di angka yang rendah. Ditambah, pemberlakuan PSBB yang dimulai sejak 10 April 2020 maka akan semakin menurunkan tingkat konsumsi masyarakat.

Gambar 8. Tingkat Inflasi (mtm,%)



Sumber : BPS, 2020

Dengan kondisi pembatasan sosial seperti ini maka diperkirakan hingga akhir tahun inflasi akan terjaga rendah dan sesuai sasaran yang ditetapkan yaitu 3 persen \pm 1 persen. Kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah maupun Bank Sentral tersebut, harus menyesuaikan dengan keadaan dinamika pertumbuhan ekonomi dalam perekonomian baik itu pada sisi *demand* maupun *supply*.

¹ Angka ini diperoleh berdasarkan rata-rata tren pertumbuhan ekonomi Indonesia selama lima tahun kebelakang sekaligus mempertimbangkan prediksi pertumbuhan dari beberapa lembaga internasional

Dalam situasi pandemi saat ini, tidak dipungkiri akan ada gangguan dari sisi *supply* akibat terbatasnya aktivitas sehingga menurunnya produktivitas dunia usaha. Oleh karenanya, respon kebijakan yang akan dilakukan ialah melonggarkan kebijakan likuiditas perekonomian untuk merangsang peningkatan penawaran. Namun apabila tidak dibarengi dengan perbaikan dari sisi *demand* justru akan semakin memperburuk kondisi perekonomian akibat daya beli masyarakat yang belum membaik. Dengan demikian, perlu ada kebijakan yang tepat dalam merespon perkembangan tersebut agar inflasi tetapi terjaga rendah dan stabil namun tetap menjaga daya beli masyarakat guna menopang pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.

Tren inflasi yang rendah dengan realisasi rata-rata inflasi tahun 2018-2019 berada pada kisaran 2,9 persen di tengah berbagai ketidakpastian global, maka diperkirakan tren ini akan terus berlanjut hingga 2021. Diperkirakan inflasi tahun 2021 dapat kembali terjaga dikisaran rendah. IMF memprediksi inflasi Indonesia berada di kisaran 2,9 persen. Sementara ADB memprediksi dikisaran 2,8 persen.

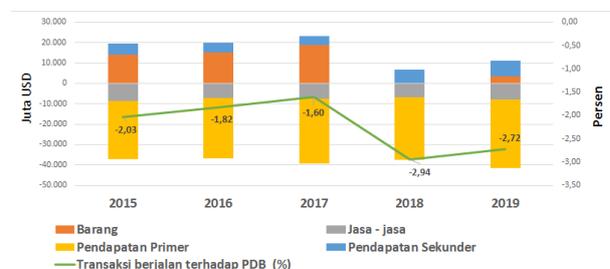
NERACA PEMBAYARAN INDONESIA

Diperkirakan Tetap Terjaga Baik Didukung oleh Defisit Transaksi Berjalan yang Rendah

Neraca pembayaran Indonesia (NPI) menunjukkan kinerja yang baik hingga tahun 2019 ditengah ekonomi dunia yang kurang kondusif. Kondisi ini didukung oleh perbaikan kinerja defisit transaksi berjalan yang diperkirakan akan rendah. Pada gambar 9 menunjukkan bahwa defisit transaksi berjalan terhadap PDB membaik diangka 2,72 persen di tahun 2019 dari sebelumnya di angka 2,94 pada tahun 2018. Hal ini dipengaruhi perbaikan di berbagai komponennya, terutama neraca perdagangan. Neraca perdagangan Indonesia menunjukkan nilai yang surplus di periode Januari-April 2020 ini di tengah pandemi ini.

Hal ini tidak hanya dipengaruhi oleh penurunan impor tetapi ternyata kinerja ekspor yang meningkat. BPS mencatat nilai ekspor pada periode Januari-April ini tercatat USD53.954,2 juta sementara impor tercatat sebesar USD51.707,0 juta sehingga neraca perdagangan menunjukkan surplus USD2.247,2 juta. Surplus ini tercatat sebagai salah satu surplus tertinggi selama 3 tahun kebelakang dalam periode Januari-April (Gambar 10).

Gambar 9. Transaksi Berjalan Indonesia (Juta USD) dan Prosentase Terhadap PDB



Sumber : BPS, 2020

Gambar 10. Neraca Perdagangan Barang Januari-April Tahun 2015-2020 (USD Miliar)



Sumber : Bank Indonesia, 2020

Adapun penyumbang ekspor terbesar pada periode Januari-April 2020 ini yaitu sektor industri pengolahan yang mengalami peningkatan sebesar 7,14 persen (yoy) dibanding periode yang sama tahun lalu. Sementara itu, sektor yang mengalami perlambatan yaitu sektor migas dan tambang masing-masing sebesar negatif 31,75 persen (yoy) dan 16,72 persen (yoy) dibanding periode yang sama tahun lalu. Adapun pangsa ekspor masih didominasi Tiongkok (15,3%) diikuti Amerika Serikat (12,24%) dan Jepang (8,68%). Secara umum, kinerja ekspor ditengah pandemi ini justru lebih baik dengan tumbuh 0,44 persen dibanding periode yang sama tahun lalu. (BPS 2020)

Selain kinerja ekspor yang membaik, penurunan impor di periode Januari-April 2020 ini turut mengurangi defisit neraca perdagangan. Namun penurunan impor pada periode Januari-April ini hingga negatif 7,78 persen (yoy) juga perlu diwaspadai. Penurunan impor tersebut mengindikasikan bahwa aktivitas ekonomi domestik sedang menurun. Hal ini ditunjukkan dengan komoditas impor yang mengalami penurunan merupakan bahan baku/penolong yang dibutuhkan industri. Adapun peran bahan baku/penolong sebesar 75 persen dari total impor Indonesia. Pada periode Januari-April 2020 impor bahan baku/penolong mengalami penurunan sebesar negatif 7,3 persen (yoy) dibanding periode yang sama tahun lalu. Negara pemasok barang impor masih didominasi Tiongkok (26,7%), diikuti Jepang (10,57%) dan Singapura (6%).

Kinerja perdagangan yang surplus ditengah wabah pandemi Covid-19 membawa optimisme ketahanan eksternal yang baik di tahun 2021. Dengan asumsi wabah ini akan berakhir di pertengahan tahun 2020 maka defisit neraca berjalan terhadap PDB pada tahun 2021 dapat dijaga kisaran rendah. Adapun rata-rata defisit neraca berjalan terhadap PDB sepanjang 2015-2019 ialah 2,2 persen, sehingga dengan membaiknya neraca perdagangan maka defisit neraca berjalan terhadap PDB tahun 2021 dapat terjaga dikisaran rendah. IMF memprediksi defisit neraca berjalan terhadap PDB Indonesia sebesar 3,2 persen di tahun 2020 dan 2,7 persen di tahun 2021. ADB memproyeksi defisit neraca berjalan berada dikisaran 2,9 persen pada tahun 2020 dan 2021.

NILAI TUKAR R U P I A H **Fluktuatif di Masa Pandemi dan Diperkirakan Bergerak Membaik di Tahun 2021 Didukung Faktor Fundamental yang Terjaga**

Pandemi Covid-19 telah menyebabkan pasar keuangan nasional bergejolak. Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) mencatat aliran modal keluar yang sangat tinggi mencapai Rp145,28 triliun pada periode Januari-Maret. Dimana angka ini lebih dari dua kali lipat pada saat terjadi guncangan krisis global. Saat krisis finansial 2008, arus modal asing yang keluar dari Indonesia mencapai Rp69,9 triliun dan saat krisis *taper tantrum* 2013, *capital outflow* tercatat Rp36 triliun .

Kepanikan di pasar turut meningkatkan arus fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar. Di awal tahun nilai tukar sempat menguat di level Rp13.600/USD namun setelahnya mengalami depresiasi hingga menyentuh level Rp16.600/USD per 23 Maret 2020. Memasuki pertengahan April, rupiah kembali bergerak menguat. Hingga memasuki Mei, nilai tukar rupiah sempat menguat ke level Rp14.900/USD, yang menunjukkan memulihnya kepercayaan investor terhadap pasar domestik.

Gambar 11. Nilai Tukar Rupiah Terhadap USD



Sumber : Bank Indonesia, 2020

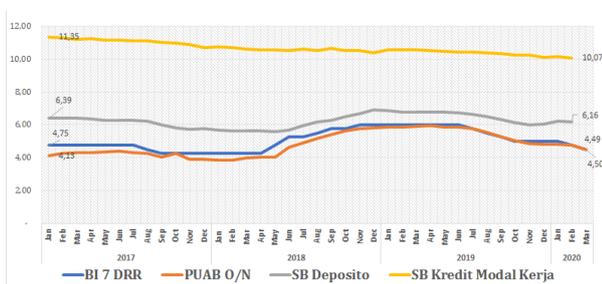
Sementara itu dari faktor eksternal, mulai kembali Bergeraknya roda aktivitas ekonomi di beberapa negara seiring pelonggaran kebijakan *lockdown*, turut menjadi faktor sentimen positif bagi rupiah. Sementara itu, beberapa sentimen negatif yang dapat memengaruhi pergerakan nilai tukar, yaitu ketegangan hubungan antara AS dan Tiongkok. Dilihat dari faktor fundamentalnya, nilai tukar rupiah diperkirakan akan menguat di akhir tahun 2020 yang dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya;

inflasi yang rendah dan terkendali, defisit transaksi berjalan yang terjaga rendah serta tingkat imbal hasil investasi yang menarik dimana *yield* tenor 10 tahun hingga bulan Mei 2020 sebesar 8,02 persen. Oleh karena itu, seiring dengan membaiknya kondisi global dan berbagai upaya yang dilakukan otoritas moneter dalam menjaga fundamental nilai tukar ditengah ketidakpastian global maka diprediksikan pergerakan kurs akan lebih baik dan stabil pada tahun 2021.

Pelonggaran Kebijakan Moneter Mendorong Pemulihan Ekonomi 2021

Sejak awal tahun ini Bank Indonesia telah dua kali menurunkan BI 7 days reverse repo rate (BI7DRR) yaitu 25 bps pada Rapat Dewan Gubernur (RDG) 20 Februari 2020 menjadi 4,75 persen dan turun kembali 25 bps pada RDG 19 Maret 2020 menjadi 4,5 persen. Kebijakan ini yang kemudian akan diimplementasikan pada operasi moneter melalui pengelolaan likuiditas di pasar uang untuk mencapai sasaran operasional kebijakan moneter. Sasaran operasional kebijakan moneter dicerminkan pada perkembangan suku bunga Pasar Uang Antar Bank *Overnight* (PUAB O/N). Pada gambar 12 menunjukkan suku bunga PUAB O/N terjaga di kisaran suku bunga kebijakan moneter (BI7DRR).

Gambar 12. Transmisi Antar Tingkat Suku Bunga, 2017-2020 (%)



Sumber : Bank Indonesia, 2020

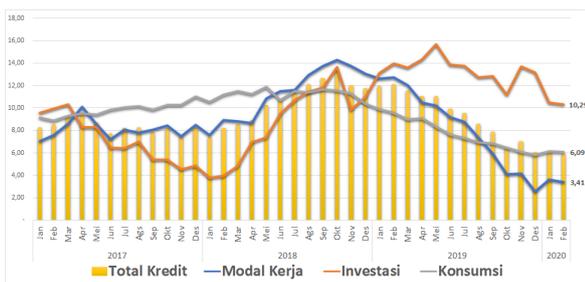
Rata-rata harian (RRH) suku bunga PUAB O/N pada Maret 2020 tercatat 4,49 persen, berada tepat pada suku bunga kebijakan BI-7DRR sebesar 4,5 persen. Melalui pergerakan di suku bunga PUAB ini kemudian diharapkan diikuti oleh perkembangan suku bunga deposito dan pada gilirannya suku bunga kredit perbankan.

Bila dilihat trennya pelonggaran suku bunga acuan (BI7DRR) sudah dilaksanakan sejak Juni 2019 dimana transmisi pelonggaran ini berlanjut ke suku bunga perbankan baik suku bunga deposito maupun kredit (Gambar 12). Sejak pelonggaran tersebut, rerata suku bunga deposito tercatat turun 67 bps menjadi 6,16 persen per Februari 2020. Sementara itu, suku bunga kredit khususnya kredit modal kerja hanya turun 35 bps menjadi 10,07 persen. Meskipun demikian, fungsi intermediasi ke perbankan belum sepenuhnya optimal. Hal ini ditunjukkan dari pertumbuhan kredit yang masih belum kuat tercermin dari angka pertumbuhan kredit pada Februari 2020 yang justru melemah ke angka 5,93 persen (yoy), angka ini turun dari bulan Januari yang sempat tumbuh 6,1 persen (yoy) (Gambar 13).

Hampir semua pertumbuhan jenis kredit baik konsumsi, investasi, dan modal kerja mengalami penurunan di bulan Februari.

Pertumbuhan kredit yang masih lemah dipengaruhi oleh permintaan kredit yang belum kuat sejalan dengan kegiatan ekonomi yang belum membaik. Terutama memasuki bulan Februari, dimana kondisi perekonomian mulai memburuk seiring dengan meluasnya wabah Covid-19 di beberapa negara. Meskipun demikian, ditengah ketidakpastian akibat pandemi, kebijakan pelonggaran moneter masih diandalkan dalam menjaga stabilitas keuangan. Kebijakan ini memang tidak berdampak langsung pada sektor riil, karena pada dasarnya proses transmisi dari sasaran operasional ke sasaran akhir membutuhkan waktu yang panjang (*time lag*).

Gambar 13. Pertumbuhan Kredit Perbankan (%)



Sumber : Bank Indonesia, 2020

Pada situasi ini, dalam menjaga likuiditas perbankan dan menyelamatkan dunia usaha ditengah pandemi dan pemberlakuan PSBB, Bank Indonesia menambah *Quantitative Easing* (QE) dengan injeksi likuiditas ke perbankan dalam jumlah besar. Secara total QE oleh BI mencapai Rp503,8 triliun dalam periode Januari-Mei 2020. Adapun QE tersebut terdiri dari pembelian SBN dari pasar sekunder Rp166,2 triliun, *term-repo* perbankan Rp137,1 triliun, *FX swap* Rp29,7 triliun, penurunan GWM Rupiah (Januari dan April) Rp53 triliun dan Mei 2020 sebesar Rp117,8 triliun serta tidak mewajibkan tambahan giro bagi yang tidak memenuhi rasio intermediasi makroprudensial (RIM) sebesar Rp15,8 triliun.

Dari pelonggaran ini diharapkan dapat ditransmisikan ke sektor riil melalui perbankan dengan dukungan kebijakan OJK berupa restrukturisasi kebijakan kredit perbankan dan stimulus fiskal pemerintah berupa insentif perpajakan.

Di tahun 2021 yang diperkirakan awal dari proses pemulihan, maka kebijakan pelonggaran BI diharapkan terus berlanjut. Dalam upaya pemulihan ekonomi, kebijakan moneter yang longgar dan akomodatif menjadi langkah awal dalam meningkatkan kembali gairah perekonomian. Melalui kebijakan moneter ini maka diharapkan pertumbuhan ekonomi yang baik, stabilitas harga yang terjaga serta keseimbangan neraca pembayaran yang positif dapat tercapai di tahun 2021.

Prospek Kebijakan Fiskal 2021

Fokus kebijakan fiskal tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2021 adalah untuk pemulihan sosial ekonomi dan mempersiapkan fondasi untuk keluar dari *Middle Income Trap* (MIT), oleh karena itu langkah strategis yang akan dilakukan Pemerintah adalah:

- Optimalisasi pendapatan yang inovatif dan mendukung dunia usaha untuk pemulihan ekonomi
- Belanja negara yang fokus dan efektif (*spending better*), salah satunya fokus belanja negara terhadap program prioritas (kesehatan program perlindungan sosial, pendidikan, dukungan dunia usaha dan UMKM)
- Pembiayaan yang inovatif, fleksibel dan *sustainable*.

Kebijakan fiskal yang disusun tersebut memang difokuskan pada proses pemulihan ekonomi. Oleh karena itu, penerimaan negarapun belum dapat diandalkan dalam menopang belanja negara, sehingga defisit anggaran belum sepenuhnya dapat ditekan. Dimana defisit anggaran tahun 2021 masih melebar dikisaran 3,21 persen - 4,17 persen. Dalam menambal defisit ini diperlukan perencanaan pembiayaan yang tepat ditahun 2021.

Ketidaktepatan bentuk pembiayaan akan menyebabkan beban utang yang besar sehingga berisiko gagal bayar yang dapat menurunkan kepercayaan internasional terhadap Indonesia di masa mendatang.

Kebijakan fiskal 2021 yang disusun harus memperkuat daya tahan ekonomi nasional yang mampu mengatasi berbagai risiko

yang muncul sekaligus melindungi ekonomi negara dari gejolak dan ketidakpastian ekonomi global, termasuk akibat bencana non alam seperti merebaknya Covid-19. Belajar dari pandemi ini maka dalam penyusunan kebijakan fiskal dan perencanaan pembangunan perlu mengkalkulasi sejumlah risiko ketidakpastian sekaligus memperhitungkan bentuk mitigasinya.

REKOMENDASI

Pemulihan ekonomi baik secara global maupun domestik sangat bergantung seberapa cepat pandemi ini berakhir. Oleh karena itu diperlukan ketegasan kebijakan pemerintah dalam memutuskan tali penyebaran wabah Covid-19 ini. Pemerintah harus terus mengevaluasi pelaksanaan kebijakan PSBB agar hingga akhir kuartal II sudah menunjukkan tren penurunan persebaran Covid-19 secara konsisten dan membaik di kuartal III. Dengan demikian di tahun 2021, menjadi momentum bagi Indonesia dalam melaksanakan pemulihan sosial ekonomi dan meningkatkan fundamental ekonomi melalui reformasi kebijakan fiskal maupun moneter. Adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan:

- Sebagai penyumbang 50 persen PDB, maka basis konsumsi masyarakat harus diperkuat. Namun yang perlu diwaspadai ialah stabilitas harga harus tetap terjaga dikisaran yang rendah demi meningkatkan daya beli masyarakat. Terutama pada kebutuhan pokok makanan dan energi (seperti BBM dan listrik).
- Dalam meningkatkan daya tahan ekonomi terhadap guncangan-guncangan eksternal lain yang mungkin terjadi, pemerintah harus melanjutkan upaya diversifikasi negara tujuan ekspor dengan menasar mitra-mitra non-tradisional (seperti negara-negara Afrika, Amerika Latin dan Eropa Timur).
- Pandemi ini juga sangat menghambat rantai pasok global. Dimana saat ini Tiongkok merupakan pemain utama dalam rantai pasok global. Di Indonesia, hampir 30-50 persen bahan baku industri bergantung pada Tiongkok. Oleh karena itu, momentum ini harus diambil Pemerintah dalam meningkatkan industri dalam negeri guna menjadi produsen bagi pasar dalam negeri. Dalam mendukung hal tersebut, perlu upaya peningkatan konektivitas antardaerah dan penurunan biaya logistik perlu dipercepat guna memaksimalkan potensi pasar dalam negeri untuk produk domestik.
- Disamping itu, keadaan ini akan mendorong berbagai negara untuk melakukan diversifikasi rantai pasok global, sehingga hal ini dapat menjadi peluang bagi RI untuk menarik investasi. Oleh karenanya, arah kebijakan fiskal yang diambil saat ini harus berkelanjutan guna meningkatkan kepercayaan pasar global dan daya tahan perekonomian domestik.
- Kebijakan moneter yang akomodatif perlu berlanjut di tahun 2021 sebagai langkah awal dalam meningkatkan kembali gairah perekonomian. Melalui kebijakan moneter ini diharapkan pertumbuhan ekonomi yang baik, stabilitas harga yang terjaga serta keseimbangan neraca pembayaran yang positif dapat tercapai di tahun 2021.
- Kebijakan fiskal 2021 yang disusun harus memperkuat daya tahan ekonomi nasional yang mampu mengatasi berbagai risiko yang muncul sekaligus melindungi ekonomi negara dari gejolak dan ketidakpastian ekonomi global.

Daftar Pustaka

- Asian Development Bank (ADB). April 2020. *ADB Outlook: What Drives Innovation in Asia?*
- Financial Times. 2020. “Global trade contracts as coronavirus hits world economy”. 24 April 2020. Diakses dari <https://www.ft.com/content/3427f5-5394-4661-8e52-6447fd3d9ae9>
- Badan Pusat Statistik (BPS). Pertumbuhan Ekonomi Triwulan I 2020
- . Berita Resmi Statistik : Inflasi per 4 Mei 2020 dan Ekspor Impor per 15 Mei 2020
- Bank Indonesia. 2020. Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia
- . 2020. Statistik Sistem Keuangan Indonesia Bulan April 2020
- . 2020. Perkembangan Terkini Perekonomian dan Langkah BI dalam Hadapi Covid-19
- . 2020. Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor)
- CNBC. 2020 . “Negara Lain Guyur Triliunan Perangi Covid-19”. Diakses dari <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200330103255-4-148378/negara-lain-guyur-triliunan-perangi-covid-19-ri-berapa-nih>
- FitchRatings.2020. “Global Economic Outlook: Crisis Update Late April 2020 : Coronavirus Recession Unparalleled”
- IHS Markit. *Economic Preview: Week of 4 May 2020*
- International Monetary Fund (IMF). 2020. *World Economic Outlook. Chapter 1 The Great Lockdown*. April 2020
- 2020. *Commodity Price Index*
- Kementerian Keuangan. 2020. Nota Keuangan APBN TA 2020
- . 2020. APBN Kita Bulan April 2020
- Komite Stabilitas Sistem Keuangan. 2020. Konferensi Pers KSSK 10 Mei 2020.
- Moody’s Analytics. *COVID-19: Economic Scenarios 27 Maret 2020*
- Morgen Stanley.2020. “Which Economy Emerges First on the Path to Recovery?”
- OECD. 2 March 2020. *OECD Interim Economic Assessment: Coronavirus the World Economy at Risk*
- Oilprice.2020. *Oil Price Chart*. Diakses dari <https://oilprice.com/oil-price-charts>
- Otoritas Jasa Keuangan. 2020. Statistik Perbankan Indonesia
- World Bank. 2020. *Global Economic Prospects: Slow Growth, Policy Challenges*. January 2020.
- World Economic Forum (WEF). 2020. *COVID-19: What you need to know about the coronavirus pandemic on 4 April*. Diakses dari <https://www.weforum.org/agenda/2020/04/covid-19-what-to-know-about-the-coronavirus-pandemic-on-4-april/>
- Worldmeter. 2020. *Corona Virus Update*



PUSAT KAJIAN ANGGARAN BADAN KEAHLIAN SETJEN DPR RI

**JL. JEND. GATOT SUBROTO - JAKARTA PUSAT
TELP. (021) 5715635 - FAX (021) 5715635
[HTTP://www.puskajianggaran.dpr.go.id](http://www.puskajianggaran.dpr.go.id)
EMAIL: puskaji.anggaran@dpr.go.id**